KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Dana reses naik, Dasco: disiapkan aplikasi laporan
Tanggal : Senin, 13 Oktober 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Dana Reses Naik, Dasco: Disiapkan Aplikasi Laporan

Untuk dana reses, anggota DPR 2024-2029 memperoleh Rp 702 juta, lebih besar dari periode sebelumnya. Kini, DPR tengah menyiapkan aplikasi untuk pelaporan reses tersebut.

JAKARTA, KOMPAS — Setelah DPR memutuskan untuk merasionalkan sejumlah tunjangan anggotanya, imbas dari demonstrasi besar-besaran akhir Agustus lalu, mencuat kabar kenaikan hampir dua kali lipat dana reses anggota DPR 2024-2029 jika dibandingkan dengan DPR 2019-2024.

Menanggapi kabar tersebut, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (11/10/2025), menyampaikan, perubahan besaran dana reses akibat bertambahnya titik reses yang harus dikunjungi anggota DPR.

"Periode 2019-2024, kan, Rp 400 juta (per orang untuk setiap reses). Kemudian, periode 2024-2029, karena ada penambahan indeks dan jumlah titik reses, itu jadi Rp 702 juta (per orang untuk setiap reses). Jadi, memang bukan naik, ya, tetapi karena ada penambahan itu," ucapnya.

Penyesuaian indeks dimaksud termasuk penyesuaian harga-harga dengan titik reses.

Agar tak menjadi polemik, pada Minggu (12/10), Dasco kembali menegaskan bahwa DPR juga tengah menyiapkan aplikasi pelaporan kegiatan para wakil rakyat selama masa reses. Aplikasi itu diharapkan sudah dapat digunakan pada masa reses.

"Mudah-mudahan dalam waktu masuk reses sidang nanti kita sudah bikin aplikasi, nih. Mudah-mudahan *udah* jadi. Jadi, kalau mereka klik, anggota DPR siapa, dari partai apa, kegiatan resesnya apa, dan di mana saja, itu mereka wajib (memasukkan data) sejumlah titik yang didatangi. Acaranya apa, dia harus *upload* (unggah)," tutur Dasco.

Ketua Harian Partai Gerindra itu menambahkan, langkah tersebut merupakan bentuk transparansi kepada publik. Masyarakat juga dapat melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) apabila laporan anggota DPR tidak sesuai dengan kenyataan.

Adapun saat ini anggota DPR tengah memasuki masa reses yang berlangsung 3 Oktober hingga 3 November. Untuk selanjutnya, seperti anggota DPR di periode yang lalu, masa reses akan berlangsung pada awal Desember hingga pertengahan Januari mendatang.

Disebut dikembalikan

Dasco juga memastikan bahwa para anggota DPR yang menerima kelebihan bayar dana reses telah mengembalikan dana tersebut ke Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR.

Namun, saat dikonfirmasi, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR Rahmad Budiaji enggan menjelaskan secara rinci berapa jumlah anggota DPR yang sudah mengembalikan kelebihan dana reses tersebut. "Saya tunggu arahan pimpinan kalau ada yang minta detailnya. Silakan, nanti *Kompas* sambung ke pimpinan lagi," kata Rahmad.

Terkait aplikasi pelaporan kinerja reses, Rahmad mengatakan, informasi lengkap akan disampaikan langsung oleh pimpinan Setjen dan pimpinan DPR setelah waktunya siap. "Sabar, ya, pimpinan nanti yang akan menyampaikan ke teman-teman media," ujarnya.

Publik terus menyoroti besaran tunjangan bagi anggota DPR. Pada akhir Agustus lalu, tunjangan perumahan untuk anggota DPR Rp 50 juta per bulan menyulut reaksi publik. Tunjangan yang diberikan ini dinilai bertolak belakang dengan kondisi masyarakat dan upaya efisiensi anggaran yang dilakukan negara sehingga masyarakat menuntut DPR untuk menghapus tunjangan tersebut.

DPR lalu menjawab tuntutan publik dengan menghapus fasilitas tersebut per 31 Agustus 2025. Masih dalam rangkaian pemenuhan tuntutan publik ini, rapat antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi pada 4 September 2025 menyepakati sejumlah poin.

Selain penghapusan tunjangan perumahan, DPR juga mengevaluasi total gaji dan tunjangan yang diterima para anggotanya. Secara garis besar, total yang diterima anggota DPR setiap bulan mencapai Rp 65,59 juta setelah dipotong pajak. Ini terdiri dari total gaji dan tunjangan yang melekat Rp 16,77 juta serta tunjangan konstitusional Rp 57,43 juta.

Persoalan transparansi

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan, penambahan dana reses dikritik publik karena tidak adanya transparansi di dalamnya. Selama ini, tidak ada informasi yang disampaikan DPR terkait penyerapan aspirasi dan sejauh mana bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dia pun memandang, langkah DPR membuat aplikasi pelaporan reses bersifat reaktif. Terlebih, selama ini DPR belum sepenuhnya berhasil memanfaatkan teknologi informasi untuk membuka diri. "Lihat saja situs web DPR. Anggarannya besar, tetapi informasinya miskin dan jarang diperbarui. Laporan kegiatan pimpinan saja sulit ditemukan," katanya.

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Siska Barimbing, pun memandang penggunaan teknologi oleh DPR berupa aplikasi untuk melaporkan kegiatan reses itu belum cukup jika tidak disertai ukuran kinerja yang jelas. "Sebelum membuat penilaian kinerja DPR, harus ada indikator kinerjanya dulu supaya jelas bagaimana penilaiannya," ujarnya.

Menurut Siska, perlu dikaji pula sejauh mana MKD diberi kewenangan untuk mengevaluasi kinerja anggota DPR. "Kalau belum ada dasar aturannya, harus dibuat dulu," ujarnya.

Ia menambahkan, dengan nilai tunjangan yang besar, semestinya kegiatan reses benar-benar dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi rakyat di daerah pemilihan. Aspirasi tersebut seharusnya menjadi agenda utama dalam setiap rapat kerja DPR.

"Akuntabilitas tunjangan reses harus diperkuat. Kepala Biro Umum DPR perlu membuat standar pertanggungjawaban yang transparan agar belanja reses berdampak nyata pada penyerapan aspirasi rakyat, bukan sekadar formalitas," ujarnya. (RTG/BOW)